

# MIGRASI DAN ETNISITAS DI KAIMANA, PAPUA BARAT

**OLEH: RIWANTO TIRTOSUDARMO**

(Peneliti Senior PMB LIPI)

Seminar Akhir Tahun

**“INTEGRASI SOSIAL EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN SOSIAL  
POLITIK PAPUA KE INDONESIA: TINJAUAN AKADEMIK”**

Kamis, 18 Desember 2014 | Pkl. 09.00-16.00 WIB, Auditorium LIPI, Lt.2 - Jakarta

Kerjasama Tim Kajian Papua P2 Politik dengan Jaringan Damai Papua (JDP)



# Migrasi dan Etnisitas di Kaimana, Papua Barat<sup>1</sup>

**Riwanto Tirtosudarmo**  
*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

What will come out of these migrations—what identities are being and will be produced—are hugely complex, and largely still unanswerable, questions.

Ben Anderson (2001)

## Geografi, Migrasi dan Etnisitas

Kaimana adalah nama sepetak kawasan yang terletak di bagian barat-laut sebuah wilayah yang sejak tahun 2000 menjadi provinsi Papua Barat. Bibir pantainya yang melengkung menghadap ke laut Banda, berhadapan dengan rangkaian pulau-pulau kecil: Kei, Banda, Banda Eli, Gorom, Seram. Ketika cuaca cerah, menjelang matahari terbenam, tercipta pemandangan senjakala yang indah mempersona siapapun yang menatapnya.<sup>2</sup> Kaimana sejak tahun 2002 diresmikan sebagai sebuah kabupaten di provinsi Papua Barat.<sup>3</sup> Pada saat ini Kaimana terbagi menjadi 7 kecamatan atau distrik. Pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Kaimana berjumlah 46.243 jiwa, meningkat cukup pesat dari 26.703 jiwa pada tahun 2000.<sup>4</sup> Pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir mencapai 5,64 persen per tahun, sebuah angka yang tinggi – yang merupakan sebuah gejala dinamika demografis yang memang umum terjadi di Papua, jauh melampaui laju pertumbuhan secara nasional. Distrik Kaimana merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk sangat tinggi, yaitu 9,79 persen, yang terutama merupakan pengaruh dari

<sup>1</sup> Makalah untuk Seminar Akhir Tahun Tim Kajian Papua LIPI dan Jaringan Damai Papua (JDP), 18 Desember 2014, Auditorium LIPI, Lt. 2, Jakarta Selatan. Makalah ini adalah bentuk pendek dari laporan yang menjadi bagian dari penelitian tentang Sejarah Kaimana yang dikoordinir oleh Dr. Muridan Widjojo (alm).

<sup>2</sup> Keindahan ini mengilhami seorang penyanyi, Alfian, menciptakan dan menyanyikan lagu, yang sampai hari ini cukup terkenal “Senja di Kaimana”.

<sup>3</sup> Dalam sebuah tulisan di Kompas (4 Maret 2009), dikatakan “Ibarat rumah, Papua Barat merupakan beranda dari Pulau Papua. Sisi ini umumnya untuk menerima tamu. Penghuninya pun lebih terbuka dan terbiasa menerima pengunjung dari beragam budaya dan politik”.

<sup>4</sup> Lihat “Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Kaimana (BPS, 2010)

tingginya migrasi masuk penduduk dari daerah-daerah lain, di luar Papua, ke Kaimana. Migrasi masuk ke Papua terutama sejak wilayah ini menjadi bagian dari Republik Indonesia memang cukup tinggi terutama mengingat jumlah penduduk yang kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Sebagai sebuah kawasan, Kaimana sebetulnya tidak mudah dijangkau oleh dunia luar. Lanskap geografisnya sebagai ceruk yang dikelilingi pegunungan membuat Kaimana sampai saat ini hanya bisa dijangkau melalui laut dan udara. Posisi geografis semacam ini menyebabkan Kaimana relatif tertutup dan boleh dikatakan baru membuka diri terhadap dunia luar setelah Indonesia secara agresif mengirimkan “sukarelawan” ke Kaimana (dan tempat-tempat lain di Papua) mulai awal tahun 1960an sampai awal tahun 1970an. Meskipun demikian bukan berarti Kaimana pra-Indonesia merupakan sebuah *terra incognita*. Kehadiran agama Islam sebelum datangnya Orang Eropa dan agama Kristen, sebagaimana terlihat dari observasi dan wawancara dengan para narasumber (2010), menjadi bukti yang paling nyata dari telah berlangsungnya proses pertemuan antar budaya antara penduduk setempat – yaitu mereka yang lebih dahulu tinggal di Kaimana dengan para pendatang yang datang kemudian. Kisah yang berkembang sampai hari ini tentang Raja Namatota dan Raja Komisi yang telah memeluk agama Islam di Kaimana adalah sebuah bukti sejarah yang paling otentik akan terjadinya “percampuran” berbagai identitas kultural di Kaimana.

Percampuran identitas kultural mengandaikan adanya pertemuan kelompok-kelompok yang memiliki identitas etnis yang berbeda. Pertemuan itu hanya mungkin terjadi karena adanya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, atau migrasi. Penduduk yang melakukan migrasi membawa serta berbagai atribut sosial yang menjadi identitas kulturalnya masing-masing. Identitas kultural inilah yang menjadikan sebuah kelompok menjadi kelompok etnik (*ethnic group*). Etnisitas (*ethnicity*) dalam tulisan ini diartikan sebagai sebuah konstruksi sosial yang memperlihatkan bahwa identitas kultural yang menjadi atribut dari sekelompok orang atau sebuah masyarakat tidak bersifat menetap namun dapat berubah sesuai dengan situasinya (Barth, 1969). Dengan demikian, etnisitas bersifat situasional-kontekstual dan merupakan sesuatu yang dapat dikonstruksi atau direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan kelompok atau orang yang bersangkutan. Di Kaimana, percampuran identitas kultural terus berlangsung hingga hari ini. Persoalan pelik yang selalu muncul adalah, percampuran yang terbukti pernah ada seperti tercermin dari kisah Raja Namatota dan Raja Komisi, bersamaan dengan kedatangan Orang

Eropa dan mulai masuknya agama Kristen, melahirkan situasi yang baru dan percampuran mulai bergeser menjadi kontestasi antara identitas-identitas kultural yang berbeda. Perbedaan identitas mulai dirasakan sebagai gejala sosial yang semakin mengeras, ketika Kaimana terlibat sebagai bagian dari arena kontestasi politik antar kelompok untuk menanamkan hegemoninya. Kontestasi identitas semakin jelas terjadi setelah Kecamatan Kaimana berkembang menjadi Kabupaten Kaimana, setiap suku mengklaim bahwa mereka adalah suku tertua sehingga berhak mendapatkan privilege sebagai orang asli di Kota Kaimana.

Membicarakan migrasi dan etnisitas di Kaimana tidak mungkin dilepaskan dari berbagai perubahan sosial yang terjadi di Papua (bahkan termasuk PNG) sebagai sebuah kawasan maupun kesatuan budaya (Melanesia).<sup>5</sup> Papua dalam konteks migrasi, baik yang bersifat regional maupun global, dapat dilihat (diasumsikan) sebagai sebuah daerah *frontier* (*frontier area*) yang merupakan sebuah kawasan yang perkembangannya sangat ditentukan oleh hadirnya para pendatang atau migran. Pendatang atau migran yang datang ke daerah *frontier* seperti halnya Papua, pada umumnya tertarik karena adanya tujuan untuk mendapatkan barang yang ada di Papua, dan karena itu pada awalnya biasanya tidak bertujuan untuk menetap. Sebelum terjadinya kontak dengan dunia luar, yang terjadi baru beberapa ratus tahun yang lalu, Papua (berserta

---

<sup>5</sup> Menurut Moore (2003: 3) *Today, "Melanesia" has become a geographic and cultural shorthand description for the inhabitants and the chain of large mountainous islands beginning in the west at the Maluku and Timor-Flores region adjacent to New Guinea, progressing southeast through New Guinea, the Solomon, Santa Cruz, Torres, Banks, and New Hebrides Groups, to Fiji and New Caledonia.* Namun demikian Moore (2003:3-4) secara kritis menilai bahwa konsep "Melanesia" harus dipahami tidak sekedar sebagai konsep geografis namun terutama justru sebagai konsep sejarah politik, terutama dalam konteks proses dekolonisasi kawasan Pasifik Barat-Daya (Southwest Pacific). Penduduk di kawasan ini mengidentifikasi diri sebagai Melanesia dan menggagas masa depan mereka sebagai Melanesia. Ada dua alasan sejarah kontemporer yang melatarbelakangi mengapa gagasan Melanesia bertahan bahkan menguat. Pertama, seluruh kawasan ini memiliki sejarah kolonial yang sama, meskipun ada perbedaan antar daerah berdasarkan asal bangsa penjajahnya, namun semuanya adalah jajahan Eropa. Pada saat dijajah bangsa Eropa inilah tercipta konstruksi sosial tertentu dari penduduk di kawasan ini, yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang berdasar "social Darwinism" disatu pihak, dan kebijakan kolonial yang bertolak dari anggapan adanya hirarki rasial, dipihak lain. Kedua, setelah proses dekolonisasi terjadi, penduduk kawasan ini secara sengaja mempribumikan konsep Melanesia yang ironisnya merupakan kreasi Orang Eropa, sebagai identitas mereka. Mereka yang menyebut diri sebagai Orang Melanesia (Melanesians) menurut Moore sesungguhnya terdiri dari berbagai kelompok penduduk yang sangat beragam baik secara fisik maupun secara budaya, dan tidak ada korelasi antara penampilan fisik, bahasa yang dipakai dan sejarah migrasinya. Melanesia adalah manusia yang selama lebih dari 10 ribu tahun mengalami migrasi ganda (multiple migrations) keluar dari Asia, sebuah proses yang juga menjadi kompleks karena adanya sejumlah arus balik migrasi kembali ke Asia. *Dark skins, tight curly hair, and emphasis on root-crop cultivation are not unique identifiers. Grouped together as Melanesians one finds the light-skinned, golden-haired lagoon-dwellers of Malaita in the central Solomon Islands, the tall blue-black-skinned people of Buka in the northern Solomon Islands, and the short-statured brown-skinned Huli or Engan wigmen of the south and central New Guinea Highlands. Tight curly hair is fairly typical, but in some areas, particularly noticeable in southeast New Guinea and in the Massim (the islands off the eastern tail of New Guinea), hair is wavy, not tightly curled.*

PNG) merupakan sebuah kawasan yang selama sedikitnya 40 ribu tahun penduduknya telah berinteraksi satu sama lain, yang menurut Moore (2003) “giving the island a history back to the very beginnings of the modern human race”. Moore (2003) mendeskripsikan kawasan ini sebagai berikut: *The Island and its peoples had no one names. Over recent centuries, “Onin” and “Haraforas” were used fairly consistently as names for west New Guinea and its peoples, although only the word “Papua” is uniquely descriptive of the whole island and its inhabitants.* Selanjutnya Moore (2003) mencatat: *The term “Papua” or “Papuas” was already in use in the fifteenth century when the Portuguese adopted it as an identifier for the peoples of Halmahera and the other Maluku Islands. It was also used to describe the Raja Empat Islands and the Bird’s Head (Vogekop, Mejprat, or Doberai) Peninsula region of New Guinea, appearing on early seventeenth-century maps.*

Dalam konteks Indonesia pasca-kolonial, terjadi beberapa kali penggantian nama wilayah yang saat ini bernama Papua. Sebelumnya bernama Irian Barat, Irian Jaya dan menjadi Papua saat Abdurahman Wahid menjadi presiden Republik Indonesia. Perkembangan selanjutnya, akibat pemekaran, Papua menjadi nama propinsi bagian timur, sementara bagian barat menjadi propinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana adalah sebuah kabupaten dari provinsi Papua Barat. Wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Kaimana, dalam perspektif yang dipakai oleh Moore (2003:2) mungkin termasuk dalam kawasan yang dikenal sebagai “Onin”, yang dideskripsikannya sebagai berikut: *“Onin” was also used fairly widely to describe the southern side of the Bird’s Head Peninsula, a far larger area than today’s Onin Peninsula, and also the descriptor for the tens of thousand of New Guinea peoples enslaved into the Malay world.* Sangat menarik ungkapan yang dipakai oleh Moore disini yaitu *“enslaved into the Malay world”*. Ungkapan ini mengkonotasikan adanya semacam paksaan terhadap Orang Papua untuk menjadi bagian dari Dunia Melayu (Malay World). Mengikuti perspektif yang dipakai oleh Moore (2003) yang melihat Papua sebagai sebuah kesatuan geografis dan budaya yang terintegrasi, ulasan tentang migrasi dan etnisitas di Kaimana pun tidak dapat dilepaskan dalam konteks Papua secara keseluruhan.

### **Migrasi di Papua dalam Perpektif Sejarah**

Migrasi atau perpindahan penduduk secara geografis di Papua bukanlah sebuah fenomena yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Knaufs (dikutip dari Upton 2009: 75) *migration and diffusion, economic and political change, and changing dimensions of cultural value have been*

*indigenous to Melanesia for thousands years.* Selain perindahan dalam jarak pendek yang terjadi diantara kelompok-kelompok penduduk yang ada di Papua, temuan arkeologis membuktikan bahwa arus migrasi penduduk antar pulau, bahkan antar benua; memberikan kontribusi yang besar terhadap terbentuknya masyarakat Papua dalam masa yang lebih kontemporer.<sup>6</sup> Namun demikian catatan tertulis tentang migrasi masuk ke Papua baru dapat diperoleh setelah datangnya orang-orang Eropa. Di Papua, termasuk PNG, dikenal memiliki lebih dari 1000 bahasa. Keberagaman bahasa ini mencerminkan pola pemukiman penduduk yang tersebar di seluruh Papua. Secara umum ada dua pola pemukiman berdasarkan lokasi geografisnya. Yang pertama adalah mereka yang bermukim di kawasan pantai, dan yang kedua adalah mereka yang bermukim di kawasan pegunungan. Sementara itu Moore (2003) membagi menjadi tiga: *“lowland, mid-altitude, and highland”*. Menurut penelitian Diamond (dikutip dari Upton, 2009: 78) perbedaan dalam penggunaan bahasa tidak selalu mencerminkan adanya perbedaan genetik dari pemakainya, *...while there are significant linguistic differences between neighboring ethnic groups, the language boundaries do not reflect genetic differences between these peoples*. Pada masa sekarang, ketika bahasa Indonesia telah dipakai secara luas di Papua, semakin sulit untuk mengatakan bahwa perbedaan bahasa lokal mencerminkan adanya perbedaan dalam etnisitas. Tidaklah mengherankan jika Koentjaraningrat, bapak antropologi Indonesia, menekankan pentingnya memperhatikan keajemukan dalam membangun Papua.<sup>7</sup>

Etnisitas di Papua tampaknya berkembang mengikuti polanya sendiri. Untuk menggambarkan hal ini mungkin menarik mengambil contoh dari apa yang ditemukan oleh Rutherford (2003) ketika mengidentifikasi siapa yang ia maksud sebagai Orang Biak:

*Although outsiders have given them a variety of names -- from "Sor mensen" to "Meforse" to "Biakkers" to "Papuan" -- the contemporary people described in this study by and large call themselves kawasa(B) or orang(I) Biak. Numbering close to 100,000 -- if one includes Biaks living outside of Biak-Numfor Regency - - in a province with a population of 1.9 million, they share an Austronesian language, spoken in a variety of dialects, and a seafaring past. The earliest records depict Biaks as fearsome pirates, terrorizing the Moluccan coastlines to*

<sup>6</sup> Tentang migrasi yang terjadi pada masa pra-sejarah ini antara lain bisa dibaca di Peter Belwood et.al. *The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives* (1995).

<sup>7</sup> Lihat Koentjaraningrat (ed.) *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Penerbit Jambatan, 1994.

*the west of New Guinea. Other documents have portrayed them as traders, as well as raiders: travelling iron-smiths who enjoyed a far-flung network of "trade friends" and out-migrated kin. Through their delivery of tribute to Tidore - and its vassals to the east -- Biaks occupied the furthest periphery of the Spice Islands polity. Because of this longstanding relationship with Tidore, Biaks were among the first "Papuan" to encounter European explorers, merchants, missionaries and officials. This variegated history of contact on a sometimes volatile frontier put Biaks in a delicate position when in 1949, for reasons I discuss below, their "neglected" corner of the Dutch colonial empire became the last that the Netherlands would release.*

Yang ingin dikemukakan disini adalah bahwa etnisitas merupakan sebuah identitas yang melekat pada sekelompok orang yang terbentuk melalui sebuah proses sosial yang panjang dan dalam konteks politik tertentu yang bersifat khas. Etnisitas dengan demikian bukan sebuah identitas yang hanya berkaitan dengan bahasa, genetik maupun agama tertentu. Dalam bahasa Moore (2003: 11) *...the political units of Melanesia were constructed from a thousands ethno-linguistic areas, linked by interlocking trade systems radiating from cultural spheres, and often also by marriages and aggressive raiding that moved along the same exchange "roads" and "passages".* Menggunakan contoh Orang Biak sebagaimana digambarkan oleh Rutherford, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa identitas etnis di Papua memiliki proses pembentukannya sendiri, meskipun secara umum bisa dikatakan bahwa identitas itu lebih sering terhubung dengan nama tempat tertentu. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan digunakan istilah-istilah seperti Orang Kowiai, Orang Arguni, Orang Me, Orang Bugis, Orang Jawa, Orang Buton, Orang Timor, dan lain-lain sebagai penanda identitas kelompok penduduk tersebut.

Sebelum datangnya Orang Eropa, menurut Andaya (dikutip dari Upton, 2009: 82) hubungan antara Papua dan Maluku telah berlangsung sejak lama, antara 10 ribu sampai 15 ribu tahun. Adanya hubungan ini bisa dibuktikan dari penggunaan bahasa-bahasa di Halmahera dan Morotai yang mirip dengan bahasa-bahasa yang di pakai di Papua (Trans New Guinea Phylum). Begitu juga sebaliknya, mobilitas penduduk antara Maluku dan Papua juga terlihat dari dipakainya bahasa-bahasa "non-Austronesian" di pulau-pulau seperti Timor, Alor dan Pantar. Perdagangan antar pulau, mulai didominasi oleh "specialist traders" – untuk rempah-rempah,

“aromatic barks and woods” yang diduga sudah dimulai pada 2000 tahun yang lalu, hingga sekitar 250 CE, menggantikan perdagangan “plumes as prime luxuries in Asia” (Upton, 2009: 82). Moore (2003: 11) juga mengatakan bahwa migrasi penduduk pada masa pra-kolonial sangat erat kaitannya dengan perdagangan, seperti dikatakannya: *Before the diaspora that came with colonialism, local territories formed and transformed over decades of centuries. Melanesian migrated within local territories, as well from valley to valley, or island to island.* Pedagang dari luar Papua membentuk pemukiman di berbagai tempat untuk menjalankan perdagangannya. *With the itinerant nature of such traders and their need to integrate into the local communities in which they conducted their business, it can be expected that there would have been marriage between groups* (Upton, 2009: 83).<sup>8</sup>

Kelompok migran atau pendatang yang penting sebelum abad ke-20, menurut Upton (2009: 84), adalah Orang Sulawesi. Mereka datang dalam musim-musim tertentu dengan perahu-perahu dalam perjalanan menuju ke Australia Utara (Northern Territory). Karena kedekatan secara geografis antara Australia utara dengan Papua bukan mustahil mereka juga berlabuh di pantai-pantai sebelah barat Papua. Selain orang-orang Sulawesi, pedagang dan nelayan dari Cina dan Semenanjung Malaya juga diduga telah berlabuh di pantai barat Papua, sebelum datangnya Orang Eropa. Orang-orang dari Kesultanan Tidore telah melakukan kontak dengan Papua, terutama dengan penduduk yang bermukim di Kepala Burung. Kontak dengan Kesultana Tidore ini membuat orang-orang Papua di kawasan ini mendapatkan besi yang merupakan bahan untuk membuat senjata. Sebagaimana diamati oleh Upton (2009: 84)

*This technology gave the coastal leaders the ability to dominate those living inland. This contact also aided the Tidorese in establishing relationships with group further to the east. There were “interlocking worlds of relationship” which led to a network of trade between New Guinea, the Raja Ampat Island, East Seram and Halmahera.*

Sementara itu, dalam reviewnya tentang studi-studi yang pernah dilakukan di Kepala Burung, Timmer (2002:3) menyimpulkan bahwa hubungan kekuasaan dan perdagangan telah berlangsung sejak lama antara sultan-sultan di Maluku dengan “wilayah-wilayah kekuasaannya”

---

<sup>8</sup> Dalam kaitan ini menarik untuk membaca “The *Sosolot*: An eighteenth century East Indonesia trade network”, dari Goodman (2006), terutama untuk melihat interaksi antara Seram dengan Kaimana.

yang membentang sepanjang pantai barat Papua. Dari studi-studi itu Timmer (2002) juga berani menyimpulkan bahwa sepanjang pantai barat Papua, *voyages of trade, kidnapping, and pillage were undertaken by people from Eastern Indonesia, Seram, Goram, Ternate and Tidore from as early as the seventeenth century, later joined by Makassarese, Buginese, Arabs, and Chinese.*

Selanjutnya Timmer (2002: 4) mengatakan bahwa

*Trade, travel, and tribute linked the south-western coast of the Kepala Burung to a 'global' network of external relations. Particularly during the nineteenth century, when Europeans began to appreciate the beauty of bird of paradise feathers to decorate their hats, the island of New Guinea became important as source of feathers (Swadling 1996). Teminabuan and Seget became increasingly important posts for thoseraja who were instrumental in the collection and transportation of local products and manpower. The influence of raja on the northern and western shores of the Onin Peninsula lasted till the 1920s, when missionaries, Dutch military personnel and administrators, and traders of different casts became more dominant (quoted in Lotgering 1940: 36-37).*

Masih menjadi perdebatan diantara para peneliti Papua siapa Orang Eropa yang pertama kali datang di Papua. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali datang adalah dua orang pelaut Portugis, Antonio d'Abreu dan Francesco Serrano pada tahun 1511. Sementara pihak lain mengatakan bahwa Jorge de Meneses adalah orang Eropa yang pertama kali mendarat di Papua pada tahun 1526. Pendapat lain mengatakan bahwa pendatang pertama adalah Ortiz de Retez pada tahun 1545 sebagai utusan dari Raja Spanyol, yang kemudian diikuti oleh Miguel Roxo de Brito yang dianggap orang pertama yang meninggalkan tulisan tentang keadaan di kawasan Kepala Burung dan pantai utara Papua. Dari catatan-catatan Orang Eropa pertama ini jelas terlihat bahwa interaksi antara Papua dan dunia luar, terutama Indonesia bagian timur, telah berlangsung, antara lain dalam bentuk perdagangan, dimana kain, kayu gaharu, emas, *massoi* menjadi barang import ke Papua, sementara budak menjadi barang ekspor ke luar Papua. (Upton, 2009: 90).

Setelah kedatangan pelaut Portugis, pelaut Belanda menyusul, awal abad 17, dan melalui VOC yang bekerjasama dengan Kesultanan Tidore mulai menanamkan pengaruhnya di Papua, sekitar tahun 1660. Dalam reviewnya mengenai sumber-sumber tentang pengaruh Kesultanan

Tidore di Papua, Upton (2009) menilai masih merupakan perdebatan sejauh mana sesungguhnya pengaruh yang ada. Beberapa penulis menganggap bahwa pengaruh Kesultanan Tidore tidak terlalu besar, dan harus dilihat juga dalam hubungannya dengan rivalitas yang saat itu ada dengan Kesultanan Ternate dan Bacan, disamping intrikasi yang terjadi dengan kekuatan-kekuatan pelaut dan pedagang Eropa (Belanda, Inggris, Portugis).<sup>9</sup> Mengutip penelitian Swalding, Upton (2003: 93) mengatakan bahwa pedagang Cina telah melakukan transaksi dengan penduduk di kawasan Onin dan pantai barat daya Papua (Kaimana mungkin termasuk didalamnya) sejak abad ke-13. Setelah VOC berkuasa, sejak tahun 1775, hanya Orang Cina yang diperbolehkan berdagang di kawasan pantai barat dan utara Papua. *Concerned to protect their monopoly of the nutmeg trade, the Dutch government, through the Sultan of Tidore, licenced Chinese traders to do business in this area.* Para pedagang Cina sangat terkenal kemampuannya untuk melakukan negosiasi dengan penduduk setempat.

Selain pedagang dan petualang, Orang Eropa juga datang sebagai misionaris, penyebar agama Kristen di Papua, sekitar abad ke-19. Misionaris pertama yang datang adalah dari kalangan Protestan, di pulau Mansinam di dekat Manokwari. Misionaris Katolik pertama datang tahun 1905 di Merauke di pantai selatan Papua. Menurut Upton (2009: 98-99) Pemerintah Belanda membagi dua wilayah penyebaran agama di Papua: di Utara diberikan kepada misionaris Protestan dan di selatan pada misionaris Katolik. Sebelum kedatangan para misionaris Kristen, menurut Upton (2009: 99) telah dahulu datang para penyebar agama Islam dari Maluku di Papua. *Many early accounts by European explorers report that there were converts to Islam in parts of the Bird's Head region and on the south coast. There are still Muslim population in this area, however Islam never spread away from the coasts, and most Papuans are not followers of Indonesia's majority religion.* Selain para misionaris yang berasal dari Eropa, tidak sedikit misionaris yang berasal dari Indonesia bagian timur, terutama dari Kepulauan Kei, Maluku dan Sulawesi Utara. Pemerintah Belanda memberikan bantuan kepada para misionaris ini berupa gaji

---

<sup>9</sup> Tentang hal ini, bias dibaca di Muridan S Widjojo, *The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-making in Maluku, C.1780-1810*. Tanap Monographs on the History of Asian-European Interaction. Leiden: Brill Academic Publishers, 2008.

dan transportasi, selain itu juga membantu para misionaris ini untuk mengembangkan persekolahan untuk Orang Papua.<sup>10</sup>

Birokrasi pada tingkat atas diduduki oleh Orang Belanda, tetapi pada tingkat bawah diisi oleh para migrant, umumnya berasal dari Maluku dan Orang Kei. Sekitar tahun 1920an dan 1930an pemerintah Belanda mempromosikan Papua sebagai tujuan migrasi bagi Orang Indo (Eurasian). Selain mempromosikan Papua sebagai tempat untuk Orang Indo, pemerintah Belanda, menurut Penders (2002) juga berusaha menarik perhatian penduduk Belanda di Holland untuk pindah ke Papua. Belanda, menurut Penders (2002) ingin meniru Inggris yang menjadikan Australia sebagai tempat bagi imigran Belanda. *One might very well refer to New Guinea as 'Netherlands Australia'...Neither the Javanese, the Acehnese, nor the inhabitants of Palembang have any right to this 'empty country'. The Dutch were the first to occupy it, and have the right to use it for the population surplus of the Netherlands* (Penders, 2002). Menurut Penders usaha mempromosikan Papua untuk tujuan migrasi Orang Indo, dari Jawa, maupun Orang Belanda dari Holland, tidak berhasil. Selain mempropagandakan Papua sebagai tujuan migrasi Orang Belanda, pemerintah kolonial juga menjadikan Papua, dalam hal ini Boven Digul, sebagai tempat pembuangan untuk tahanan politik. Antara 1927 sampai 1962 diperkirakan ada 1500 tahanan politik yang dibuang ke Boven Digul, termasuk didalamnya Mohamad Hatta dan Sutan Sjahrir.<sup>11</sup> Berdasarkan sensus penduduk yang oleh Belanda pada tahun 1930, tercatat hanya terdapat 286 Orang Eropa di Papua. Sementara itu jumlah Orang Cina diduga cukup banyak, dalam kategori Asia Timur, yang mencapai sekitar 2000 orang. Penduduk pribumi (Papua) tercatat sebanyak 328.749 orang (Upton, 2009:106). Pada tahun 1938 diperkirakan hanya terdapat sekitar 200 Orang Eropa (Belanda) di Papua, dan 15 diantaranya adalah pejabat Belanda (Upton 2009, mengutip Bertrand).

Setelah Perang Pasifik dan Pendudukan Jepang (1942-1945), pemerintah Belanda kembali beroperasi di Papua. Ketika penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia (Serikat) dilakukan pada tahun 1949, Papua merupakan wilayah yang masih di bawah kekuasaan Belanda. Akibat penyerahan kedaulatan itu, tidak sedikit Orang Belanda dan Indo (Eurasian) yang pindah ke Papua. Menurut Penders (2002), Orang Belanda yang tadinya hanya berjumlah

<sup>10</sup> Kegiatan misionaris Kristen di desa-desa di Papua beserta pengembangan sekolah, juga diceritakan oleh salah seorang narasumber di Kaimana, Pak Wagiantoro, seorang mantan sukarelawan masa Sukarno yang kemudian menjadi guru di Kaimana (wawancara, 2010).

<sup>11</sup> Tentang migrasi politik ke Boven Digoel bisa dibaca di Tirtosudarmo (2013)

sekitar 1000an orang pada akhir 1949 meningkat secara drastis menjadi delapan ribu orang pada akhir tahun 1950. Sekitar 2 ribu Indo dipindahkan ke Manokwari berdasarkan kontrak kerja selama setahun. Pada masa ini ketegangan antara Orang Papua dan Orang Indo dan Belanda meningkat terutama berkaitan dengan adanya diskriminasi berdasarkan ras, terutama dalam pekerjaan. Selain itu, ketegangan juga muncul karena Belanda dianggap oleh Orang Papua tidak menghargai hak atas tanah yang bagi Orang Papua mempunyai nilai tinggi (Upton, 2009: 1290). Berdasarkan data tahun 1959 (Upton, 2003: 127), meskipun Orang Indonesia yang semula bekerja untuk Belanda di Papua semakin berkurang jumlahnya, masih tercatat sebanyak 14.000 migran Indonesia yang masih bekerja untuk Belanda. Mayoritas dari migran Indonesia yang masih berada di Papua ini, sebanyak delapan ribu orang, berasal dari Maluku.

Pada tanggal 1 Oktober 1962, Belanda, berdasarkan keputusan KTT Tiga Negara, harus menyerahkan Papua ke pemerintah Indonesia. Sebelum proses penyerahan ini dilakukan Papua berada dibawah pengawasan UNTEA yang berkewajiban melakukan jajak pendapat bagi penduduk Papua untuk menentukan masa depan mereka. Hasil jajak pendapat pada tahun 1969, yang oleh beberapa pihak dianggap tidak dilakukan secara adil, menyatakan penduduk Papua memilih menjadi bagian dari Indonesia.<sup>12</sup> Beberapa penulis mencatat bahwa sejak tahun 1962 pemerintah Indonesia secara aktif melakukan pengiriman tenaga kerja dari berbagai profesi, baik militer maupun sipil, dari wilayah Indonesia lain ke Papua. Inilah mungkin proses migrasi penduduk terencana yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk tujuan yang bersifat politik.<sup>13</sup> Mengutip Saltford, Upton (2009: 144) misalnya, mencatat pada awal pemerintahan transisi dibawah UNTEA, telah hadirnya sekitar 1500 tentara Indonesia di Papua, jumlah ini sama banyaknya dengan jumlah tentara PBB yang ditempatkan di Papua. Pada tahun 1963 sebanyak 1200 orang yang bekerja untuk UNTEA adalah Orang Indonesia, 200 Orang Belanda, dan 80 orang dari berbagai negara lain. Presiden Sukarno pada September 1963 juga mengeluarkan larangan bagi orang asing untuk Papua kecuali untuk kepentingan misionaris.

Pada tahun 1964 diperkirakan penduduk Indonesia mencapai 16 ribu, meningkat dua kali lipat dari saat terakhir pemerintahan Belanda tahun 1962. Sejak saat ini pendatang dari berbagai

---

<sup>12</sup> Tentang jajak pendapat dan masa peralihan antara 1962-1969 antara lain bisa dibaca di John Saltford (2003) *The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969: The anatomy of betrayal*; dan Pieter Droogelever (2009) *An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-determination in West Papua*.

<sup>13</sup> Wawancara dengan beberapa informan (2010), yang sebagian merupakan hasil dari kebijakan migrasi pemerintah pada periode ini.

tempat di luar Papua, terutama dari Sulawesi Selatan, menguasai perekonomian di kota-kota besar di Papua. Dari berbagai studi yang ada, dapat dikatakan bahwa sejak Belanda meninggalkan Papua tahun 1962 dan secara *de jure* Papua berada di bawah PBB sampai tahun 1969, secara *de facto* Papua sudah masuk kedalam wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia. Adalah sebuah ironi sejarah, ketika Papua berhasil direbut secara *de jure* dari Belanda pada tahun 1969, Sukarno yang sesungguhnya orang yang paling besar jasanya dalam merebut kembali Papua, berada dalam tahanan rumah pemerintahan Suharto Orde Baru. Pada tahun 1970 ketika Indonesia mulai secara resmi membangun Papua, Sukarno meninggal dunia.

### **Migrasi, Etnisitas dan Politik**

Sejak tahun 1970 Papua menjadi bagian dari rekayasa social pemerintah Orde Baru. Dalam konteks migrasi, secara bertahap Papua menjadi tujuan dari program pemindahan penduduk yang dikenal sebagai program transmigrasi. Secara statistik meskipun jumlah yang berhasil ditempatkan di Papua tidak besar, naun dari posisi jumlah penduduk Papua yang kecil, memiliki dampak social maupun politik yang sangat berarti. Selain dari program pengiriman yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah, yang tidak kalah pentingnya adalah migrasi penduduk yang bersifat spontan, yang pindah ke Papua atas biaya sendiri, untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik di Papua.

Migrasi yang bersifat spontan ini semakin meningkat jumlahnya sejalan dengan semakin membaiknya sarana transportasi laut dan udara, yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia bagian barat, terutama di Jawa ke berbagai kota di Papua. Jika para transmigran, oleh pemerintah ditempatkan di berbagai lokasi di luar kota, para migrant spontan sebagian besar mengadu nasib di kota-kota besar di Papua. Seperti telah diuraikan sebelumnya, migrasi spontan dalam jumlah yang relative besar sesungguhnya telah lama dilakukan oleh oran-orang yang berasal dari Sulawesi, terutama orang Bugis, Buton dan Makasar. Setelah tahun 1970an, selain para migrant dari Sulawesi, para pendatang dari Jawa mulai mendominasi arus migrasi masuk ke Papua. Migrasi ke Papua sejak awal tahun 1980an hingga hari ini merupakan bagian penting dalam diskursus tentang Papua, terutama ketika berbagai kekerasan politik terjadi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dalam diskursus tentang Papua, migrasi mendapatkan perhatian penting dari para ahli terutama di Australia, dari yang melihat migrasi sebagai strategi untuk melakukan genosida, sampai yang melihat migrasi sebagai hal yang memberikan sumbangan positif pada perkembangan masyarakat di Papua. Untuk yang anti Indonesia, lihat misalnya *Genocide in West Papua? : The role of the Indonesian state apparatus and a current needs*

Pada saat ini Kaimana, terutama di ibukotanya, merupakan sebuah kota yang terus berkembang karena jumlah penduduknya meningkat dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Hasil sementara Sensus Penduduk yang dilakukan pada bulan Mei 2010 memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaimana selama 10 tahun terakhir mencapai 5,64 persen per tahun, dan distrik Kaimana yang merupakan pusat kabupaten Kaimana pertumbuhan penduduk mencapai 9,79 persen. Hampir dipastikan pertumbuhan penduduk yang tinggi ini berasal dari dampak tingginya migrasi masuk penduduk dari daerah-daerah lain, di luar Papua, ke Kaimana, selama sepuluh terakhir ini. Pada saat ini, selain perahu-perahu tradisional yang sejak lama menjadi alat transportasi Orang Buton, Orang Bugis dan Orang-Orang dari sekitar Seram dan Kepulauan Kei, setiap 2 minggu datang perahu PELNI dari Jawa (KM Ciremai) dan KM Tatamailau yang melayani antar kota di Papua, yang menurunkan dan menaikkan penumpang di Pelabuhan Kaimana.<sup>15</sup> Selain Kapal PELNI, setiap hari pelabuhan udara Kaimana melayani dua penerbangan yang selalu dipenuhi oleh para penumpang yang datang maupun pergi dari Kaimana. Pengamatan yang bersifat impresionistik ini ikut menjelaskan mengapa angka pertumbuhan penduduk di Kaimana sangat tinggi sebagaimana terlihat dari hasil Sensus Penduduk 2010.<sup>16</sup>

Memasuki kota Kaimana segera nampak bahwa kota ini merupakan kota yang dihuni banyak kaum pendatang. Selain hal ini bias dilihat dari nama warung-warung makan yang menunjukkan daerah asal penjualannya (Coto Makasar, Nasi Padang, Warung Tegal, Ikan Bakar Lamongan), pemandangan yang menarik adalah deretan rumah-toko yang bentuk dan warnanya

---

*assessment of the Papuan people*. John Wing with Peter King, West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 2006, juga Jim Elmslie (2007) "West Papua: Genocide, Demographic Change, the Issue of 'Intent', and the Australia-Indonesia Security Treaty", Indonesian Solidarity and the West Paper Project conference: West Papua: Paths to Justice and Prosperity. Sydney University, August 9-10, 2007. Untuk yang netral, lihat Upton, Stuart, 2009, "The Impact of migration on the people of Papua. Indonesia: A historical demographic analysis". Unpublished PhD thesis, Department of History and Philosophy, University of New South Wales, dan Edward Aspinall, 2006, "Selective outrage and acknowledged fantasies: re-thinking Papua, Indonesia and Australia". *Australian Policy Forum*, 06-15, May.

<sup>15</sup> Berdasarkan data jumlah penumpang dari Kantor PELNI di Kaimana, rata-rata penumpang naik dan turun berkisar antara 750 sampai 1250 orang. Penumpang turun melonjak dengan drastis, sekitar 1500 orang, terjadi pada tanggal 25 September 2010 dari KM Ciremai. Meningkatnya jumlah penumpang yang turun ini berkaitan dengan gejala arus balik pasca-lebaran, ketika mereka yang mudik kembali dengan membawa sanak-saudaranya untuk ikut merantau. Angka penumpang naik dan turun dari kapal PELNI dapat diperoleh dari Kantor PELNI Kaimana. Sayangnya saat ke lapangan data penumpang pesawat belum dapat diperoleh. Data penumpang pesawat ini sangat diperlukan karena semakin pentingnya transportasi udara dalam memahami proses migrasi di Indonesia terutama dalam lima tahun terakhir ini.

<sup>16</sup> Angka pertumbuhan penduduk Kaimana perlu dibandingkan dengan angka pertumbuhan kabupaten lain di provinsi Papua Barat dan Papua berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010.

seragam (biru muda) di jalan utama kota Kaimana. Inilah “pecinan” tempat warga keturunan Tionghoa yang dari kisah para narasumber telah ada sejak kota Kaimana mulai ada.<sup>17</sup> Petunjuk lain yang memperlihatkan Kaimana adalah kota pendatang adalah nama-nama “kampung” yang menunjukkan dari maana penghuni kampung itu berasal: Kampung Seram, Kampung Timor, Kampung Buton, Kampung Bugis.

Dari wawancara dengan para narasumber yang dilakukan penulis ketika ditanyakan pendatang dari mana yang saat ini paling banyak tinggal di Kaimana, jawabannya adalah Orang Jawa, Orang Buton dan Orang Bugis. Para narasumber ini juga mengatakan bahwa pada awalnya jumlah pendatang paling banyak adalah Orang Buton, tetapi menurut dugaan mereka saat ini yang terbanyak adalah Orang Jawa. Orang Jawa dan Orang Bugis menurut mereka adalah pendatang baru”, mulai datang baru awal tahun 1970an, setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia. Sementara itu Orang Buton telah datang jauh sebelumnya, bahkan sebelum kedatangan Belanda, bersama Orang Kei, Orang Seram dan Orang Kur. Di kota Kaimana, kampung tertua mungkin adalah Kampung Seram yang terletak di dekat pelabuhan. Di Kaimana, berdasarkan wawancara dengan para nara sumber, “Seram” tampaknya merupakan nama generik dari orang-orang yang berasal dari pulau-pulau sebelah barat Kaimana yang telah sejak lama melakukan kontak dengan penduduk di pantai Kaimana.<sup>18</sup>

Dibandingkan semua agama pendatang, Islam adalah yang tertua. Kapan Islam masuk daerah ini tidak bisa dikatakan secara pasti; melihat hubungan dagang yang sangat terbatas di sini dengan Maluku, diduga ini baru terjadi kemudian kecuali misalnya di Onin. Daerah tempat Islam pertama menyebar, terutama melalui orang Seram, adalah Pulau Adi, Namatotte, Kayu Merah dan Aiduma, semuanya di pantai Kaimana. Baru kemudian melalui Teluk Arguni Islam masuk ke daerah Boroway. Mungkin penyebarannya baru terjadi 50-75 tahun kemudian. Islam kini memiliki pengikut yang sangat banyak di distrik teluk Arguni, di mana mereka bisa menarik 32,9 persen dari seluruh penduduk menjadi pengikutnya. Distrik ini sekarang memiliki 12 kampung Islam, sementara di tiga kampung lain sebagian besar penduduk memeluk agama

<sup>17</sup> Berikut adalah deskripsi tentang “pecinan” di Kaimana, oleh Peters’s MvO (1957): *Jalan yang terbentang di sepanjang pantai terutama dipadati dengan toko-toko Cina di kedua sisinya (seluruhnya 10 toko). Model bangunan toko ini sama: sebuah kerangka kayu besi, dinding semen, atau papan dan atap dari seng. Kini kembali dengan mudah bahan bangunan diperoleh, sehingga pemandangan toko-toko ini menjadi lebih baik. Terutama sejak tahun 1915 banyak toko yang mulai dicat dan dilengkapi dengan seng.*

<sup>18</sup> Interaksi antara Seram, khususnya Seram Timur, dan Penduduk pantai barat Papua, antara lain bias dibaca di Thomas E. Goodman (2006) “The *Sosolot*: An eighteenth century East Indonesia trade network”. Unpublished PhD thesis, UH Manoa.

Islam. Di kampung-kampung Islam yang besar sebuah mesjid berdiri, kebanyakan sebuah bangunan kecil di mana orang bisa melaksanakan ibadahnya. Hanya di Kaimana ditemukan sebuah mesjid yang ukurannya lebih besar.

Apa yang dicatat oleh Peters dalam MoV-nya pada tahun 1957 memberikan gambaran yang menarik tentang kondisi demografis di Kaimana saat itu. Beberapa informasi juga memberikan gambaran tentang siapa saja yang merupakan penduduk pendatang di Kaimana pada saat itu. Sebagaimana digambarkan dalam bagian tentang migrasi dan demografi di Papua, suhu politik di Papua belum mengalami peningkatan yang berate. Keadaan boleh dikatakan aman karena Sukarno pada saat itu masih disibukkan oleh upaya meredakan pemberontakan daerah yang terjadi di Sumatra Barat (PRRI) dan di Sulawesi (PERMESTA), disamping sisa-sisa pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Keadaan mulai memanas setelah tahun 1958 setelah Sukarno mulai mengalihkan perhatian untuk membebaskan Irian Barat.<sup>19</sup>

Sejauh yang dapat diamati dari hasil wawancara dengan para nara sumber, apa yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Peters (MoV 1957) – khususnya ketika membicarakan kelompok-kelompok pendatang di Kaimana, seperti mengalami pengurangan pada masa pasca-kolonial Belanda. Orang Buton tetap merupakan kelompok penting, meskipun sejak tahun 1970an jumlahnya mulai tersaingi oleh Orang Bugis dan Orang Jawa. Hal yang juga menarik adalah tidak dijadikannya Kaimana sebagai daerah tujuan program transmigrasi pemerintah Orde-Baru. Migrasi pasca-kolonial ke Kaimana oleh karena itu bisa dikatakan sebagian besar bersifat spontan, tanpa bantuan pemerintah (kecuali tentara dan pegawai negeri) dan karena itu sangat bergantung pada jaringan keluarga atau etnisitas. Pola migrasi yang terjadi Kaimana didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, dimana *supply and demand* atas tenaga kerja memegang peranan yang penting.

### **Catatan Penutup**

Sejarah migrasi penduduk ke Papua, berlangsung secara bergelombang, dan sejak kedatangan Orang Eropa hingga saat ini, situasi politik dan kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu, berpengaruh terhadap migrasi masuk ke Papua. Penduduk yang tinggal di daerah pantai barat Papua, dan Kaimana salah satunya, secara kebudayaan (agama, etnisitas, ekonomi dan

---

<sup>19</sup> Para narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini umumnya datang ke Papua bersamaan dengan kampanye Sukarno untuk merebut Irian Barat dari Belanda.

politik) memiliki kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan ekonomi dan politik dari pulau-pulau di sebelah baratnya, terutama di Seram dan Tidore. Identitas kebudayaan (etnisitas dan agama) dari penduduk di wilayah pantai barat Papua ini memiliki afiliasi yang kuat ke Seram dan Tidore. Kontak dan hubungan dengan Maluku dan Indonesia bagian Timur ini masih berlangsung hingga hari ini, meskipun komposisi etnis migran yang masuk ke Kaimana mengalami perubahan seiring dengan berubahnya struktur ekonomi dan keadaan politik di Papua – terutama dalam hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta.

Migrasi ke Kaimana, dan Papua pada umumnya tidak mungkin dilepaskan dari aspek etnisitas, termasuk didalamnya aspek agama. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh konstruksi etnisitas yang ada di kalangan penduduk setempat di Papua sendiri, yang karena situasi geografis dan interaksi diantara penduduknya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki identitas sosial dan kebudayaan tertentu. Berkelindannya etnisitas dan agama di Papua, juga di Kaimana menjadikan migrasi sebagai bagian penting dalam dinamika politik dan ekonomi yang berlangsung di Papua, juga di Kaimana.<sup>20</sup> Sejarah Kaimana pada akhirnya adalah sejarah interaksi antara penduduk dari berbagai latar belakang, dan seperti kata Ben Anderson (2001) yang dikutip dalam awal tulisan ini, *What will come out of these migrations—what identities are being and will be produced—are hugely complex, and largely still unanswerable, questions.*

## Daftar Pustaka

Anderson, Benedict, 2001, “Western Nationalism and Eastern Nationalism”, *New Left Review*, 9 (May-June).

Aspinall, Edward, 2006, “Selective outrage and acknowledged fantasies: re-thinking Papua, Indonesia and Australia”. *Australian Policy Forum*, 06-15, May.

Elmslie, Jim (2007) “West Papua: Genocide, Demographic Change, the Issue of ‘Intent’, and the Australia-Indonesia Security Treaty”, Indonesian Solidarity and the West Paper Project conference: West Papua: Paths to Justice and Prosperity. Sydney University, August 9-10, 2007.

---

<sup>20</sup> Kaitan antara migrasi, dan demografi pada umumnya, dengan politik, khususnya konflik, bisa dibaca di Tirtosudarmo (2014).

Barth, Fredrik, 1969, *Ethnic groups and boundaries: The social organization of cultural difference*. Boston: Little, Brown and Company.

Belwood, Peter et.al., 1995, *The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives*. Canberra: ANU E-Press.

Drooglever, Pieter, 2009, *An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-determination in West Papua*. One World Publication.

Goodman, Thomas E. , 2006, “The *Sosolot* : An eighteenth century East Indonesia trade network”. Unpublished PhD thesis, University of Hawai’i.

Koentjaraningrat (ed.), 1994, *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Penerbit Jambatan.

Moore, Clive, 2003, *New Guinea: Crossing Boundaries and History*. Honolulu: University of Hawai’I Press.

Rutherford, Danilyn, 2003, *Raiding the land of the foreigners*. Princeton: Princeton University Press.

Peter’s, 1957, MEMORIE VAN OVERGAVE (MvO) *ONDERAFDEELING KAIMANA CONTROLEUR F.H. PETERS, 1957* Reel no. 40, MvO serie 1e, ANRI.

Saltford, John, 2003, *The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969: The anatomy of betrayal;*

Timmer, Jaap, 2002, A Bibliographic Essay on the Southwestern Kepala Burung (Bird’s Head, Doberai) of Papua. Unpublished manuscript.

Tirtosudarmo, Riwanto, 2013, “Boven Digoel dan Migrasi Politik Kaum Nasionalis, 1920-1950”, dalam Soewarsono dkk, *Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel*, hal. 199-220. Jakarta: Penerbit Obor.

Tirtosudarmo, Riwanto, 2014, “The political demography of conflicts in Papua”, The Jakarta Post, 10 February.

Upton, Stuart, 2009, “The Impact of migration on the people of Papua. Indonesia: A historical demographic analysis”. Unpublished PhD thesis, Department of History and Philosophy, University of New South Wales.

Widjojo, Muridan S, 2008, *The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-making in Maluku, C.1780-1810*. Tanap Monographs on the History of Asian-European Interaction. Leiden: Brill Academic Publishers.

Wing, John Wing and Peter King, 2006, *Genocide in West Papua? : The role of the Indonesian state apparatus and a current needs assessment of the Papuan people*. West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney.